

Evaluasi Kebijakan Penerapan Aplikasi Srikandi di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun 2023 - 2024

Rosdiana Rizal¹, Safri Nurmantu²

^{1,2} Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Jakarta, Indonesia

¹ rosdianarizaluid@gmail.com, ² safri@stiami.ac.id

* corresponding author

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Article history :

Received :

Revised :

Accepted :

Keywords :

Policy Evaluation;

Srikandi Application;

Integrated Dynamic Archiving;

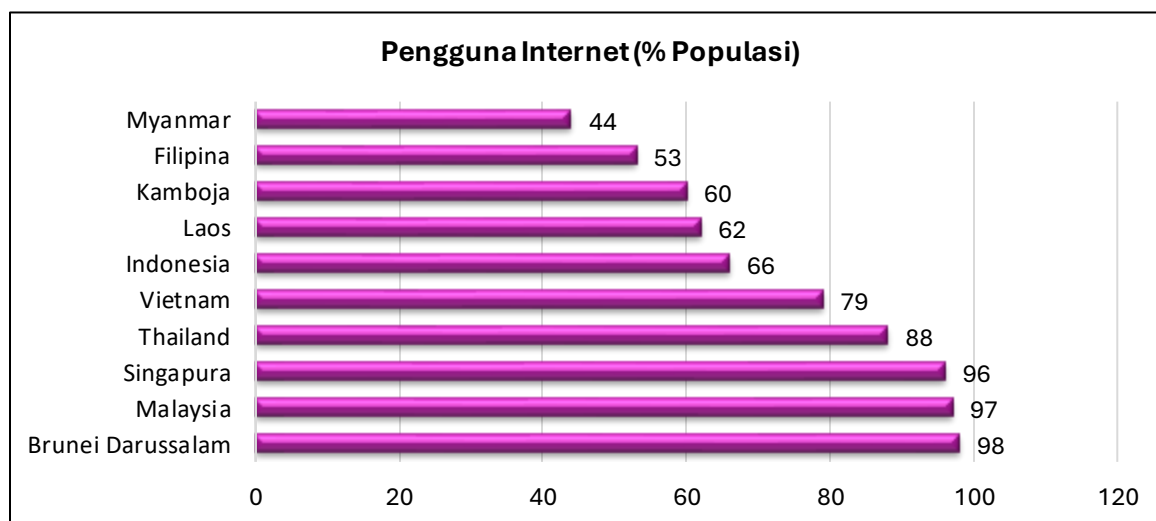
Setjen DPD RI.

This research aims to: 1) analyze the results of the evaluation of the Srikandi Application implementation at the Secretariat General of the Regional Representative Council of the Republic of Indonesia; 2) analyze the factors that may hinder the implementation of the Srikandi Application at the Secretariat General of DPD RI; and 3) examine the necessary efforts to enhance the quality of the Srikandi Application implementation in supporting the constitutional duties of the DPD RI institution. The research method used in this study is descriptive-qualitative, with informants selected through purposive sampling. Data collection techniques include interviews, literature reviews, observations, and documentation. Data analysis was conducted using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldana. The research findings indicate that the Srikandi application has successfully improved administrative effectiveness, efficiency, and real-time document accessibility, although technical challenges and the need for adjustments based on user feedback still exist. The factors hindering the use of the Srikandi application, including technological infrastructure limitations, a lack of training and socialization, and inadequate technical support, have also impacted its effectiveness. To overcome these obstacles and improve the quality of application usage, strategic measures such as increasing server capacity, network improvements, and more structured training are required. Periodic evaluations based on William Dunn's policy evaluation theory are proposed to ensure that the Srikandi application can provide maximum benefits in supporting the constitutional duties of the DPD RI institution and strengthening the electronic government system at the Secretariat General of DPD RI.

PENDAHULUAN

Saat ini, jalannya sebuah pemerintahan telah banyak memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk menyediakan layanan publik yang lebih baik. Dengan kemajuan teknologi 4.0, reformasi birokrasi didorong melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang bertujuan memberikan pelayanan pemerintah yang transparan, cepat, dan efektif (Arief & Abbas, 2021; Kencono et al., 2024). Penerapan SPBE berfokus pada meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, dengan organisasi dan perusahaan perlu responsif terhadap perkembangan teknologi untuk memberikan layanan terbaik. Teknologi informasi membantu mengarahkan dan mengendalikan bisnis, menyelaraskan strategi dan tujuan program-program pemerintahan (Choirunnisa et al., 2023).

Menurut data yang dirilis oleh *E-government Development Index* (EGDI), Indonesia masih berada di peringkat ke-77 dengan nilai 0.7160 pada tahun 2022 (The United Nations, 2022). Contoh lain, pada 9 Maret 2020, WHO mendeklarasikan virus corona (Covid-19) sebagai pandemi, dan berdasarkan Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2020, pandemi ini ditetapkan sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat. Akibatnya, instansi pemerintah dan sektor pendidikan mengubah pola kerja menjadi *work from home* dengan memanfaatkan teknologi informasi (Anukoonwattaka et al., 2021). Kondisi ini dan indeks EGDI menunjukkan pentingnya pemanfaatan teknologi informasi untuk mencapai *good governance* di Indonesia. Pada tahun 2022, tingkat penggunaan internet global adalah 66 persen. Untuk negara-negara ASEAN, tingkat pengguna internet masih mengalami ketimpangan yang cukup jauh, sebagaimana terlihat pada grafik berikut:



Gambar 1. Persentase Pengguna Internet di ASEAN

Sumber: The World Bank (2022)

Dari data di atas, penting untuk dicatat bahwa ada kesenjangan yang cukup besar di antara negara-negara anggota ASEAN dalam penggunaan informasi digital, tentu saja menimbulkan tantangan konektivitas dan integrasi *e-government* yang besar. Lima negara (Myanmar, Filipina, Kamboja, Laos, Indonesia) masih berada di bawah 70% pengguna internetnya, jika dibandingkan dengan seluruh populasinya. Srikandi adalah sistem berbasis web yang digunakan untuk mengelola proses kearsipan organisasi, termasuk di Setjen DPD RI yang mulai menerapkannya sejak tahun 2022. Srikandi adalah aplikasi umum pertama yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 679 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis (AUBKD). Dibuat untuk mengelola arsip elektronik yang dihasilkan oleh lembaga pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah, Srikandi memungkinkan integrasi antar lembaga di seluruh Indonesia, sehingga mempermudah akses dan komunikasi antar lembaga dalam satu aplikasi (Aini, 2023).

Melihat kesenjangan yang ada, penelitian ini menjadi sangat penting untuk menjembatani antara kondisi ideal (*das sollen*) dan kenyataan (*das sein*). Fokus penelitian diarahkan pada beberapa aspek kunci. Pertama, analisis teknis dan operasional diperlukan untuk mengidentifikasi akar masalah pada aplikasi dan merumuskan solusi yang dapat meningkatkan performa sistem. Kedua, evaluasi pelatihan menjadi prioritas untuk menilai sejauh mana pelatihan yang telah dilakukan efektif dan merancang strategi sosialisasi yang lebih inklusif serta berkelanjutan. Ketiga, optimalisasi infrastruktur teknologi menjadi hal yang mendesak, termasuk meningkatkan kualitas jaringan dan kapasitas server agar dapat mendukung penggunaan aplikasi secara maksimal. Terakhir, penguatan kapasitas sumber daya manusia perlu dilakukan dengan mengkaji kebutuhan arsiparis dan merancang kebijakan alokasi sumber daya yang lebih strategis.

Penelitian ini berfokus pada evaluasi penerapan aplikasi Srikandi di Setjen DPD RI selama periode 2023-2024. Fokus utama penelitian adalah pada tahap awal implementasi aplikasi ini, yang dimulai setelah diresmikannya Peraturan Sekretaris Jenderal No. 23 Tahun 2022. Pemilihan periode ini didasarkan pada relevansinya sebagai tonggak awal dalam proses adopsi aplikasi sebagai bagian dari inisiatif digitalisasi pengelolaan arsip di lingkungan Setjen DPD RI. Pembatasan waktu ini memberikan ruang untuk analisis mendalam terhadap berbagai aspek adopsi aplikasi, termasuk tantangan, kemajuan, dan hasil yang telah dicapai. Adapun tujuan penelitian ini meliputi tiga aspek utama. Pertama, menganalisis hasil evaluasi kebijakan penerapan aplikasi Srikandi di Setjen DPD RI. Kedua, mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam penerapannya. Ketiga, menelaah berbagai upaya yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas penerapan aplikasi ini sehingga mampu mendukung tugas kelembagaan secara lebih optimal. Melalui tujuan-tujuan tersebut, penelitian ini berupaya memberikan kontribusi praktis maupun konseptual bagi pengelolaan arsip di lingkungan Setjen DPD RI. Meskipun penelitian ini memiliki batasan ruang lingkup, desain metodologinya dirancang untuk memastikan validitas dan akurasi temuan. Dengan menggunakan metode yang tepat dan teknik analisis yang cermat, penelitian ini diharapkan memberikan wawasan yang komprehensif. Temuan yang dihasilkan juga

diharapkan menjadi dasar bagi pengembangan lebih lanjut dalam implementasi aplikasi Srikandi, khususnya dalam mendukung tugas-tugas konstitusional DPD RI.

LANDASAN TEORETIS

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah model evaluasi kebijakan dari William N. Dunn. Dalam teorinya, William N. Dunn mengemukakan bahwa evaluasi kebijakan dapat disamakan dengan suatu penafsiran, penilaian dan pemberian angka. Dalam hal ini evaluasi mengenai nilai dan manfaat suatu hasil kebijakan, artinya dalam evaluasi kebijakan harus memberikan informasi yang jelas dan dapat dipercaya mengenai kinerja suatu kebijakan. Lebih jelas, Dunn mengatakan bahwa evaluasi memberikan sumbangan pemikiran terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Pada umumnya sebuah nilai dapat dikritik dengan menanyakan secara mendalam sebuah kesiapan tujuan dan target dengan memberikan 6 (enam) kriteria evaluasi kebijakan yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsifitas, ketepatan.

Enam aspek yang digunakan untuk melaksanakan penelitian ini didasarkan pada teorinya William N. Dunn mencakup:

- 1) Efektivitas: Merujuk pada keberhasilan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Efektivitas berhubungan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil yang diharapkan atau mencapai tujuan dari tindakan yang diambil (Dunn, 2003:429).
- 2) Efisiensi: Terkait dengan optimalisasi penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan. Efisiensi mengukur hubungan antara efektivitas dan usaha, biasanya dinilai melalui biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang paling efisien adalah yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terendah (Dunn, 2003:430).
- 3) Kecukupan: Menilai sejauh mana tingkat efektivitas memenuhi kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang memunculkan masalah. Kecukupan terkait dengan seberapa baik alternatif pilihan memuaskan kebutuhan dan menyelesaikan permasalahan (Dunn, 2003:430).
- 4) Pemerataan: Berhubungan dengan keadilan dalam distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang baik harus adil dalam usaha dan manfaat yang dirasakannya (Dunn, 2003:434).
- 5) Responsivitas: Mengukur seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok tertentu. Keberhasilan kebijakan dilihat dari tanggapan masyarakat atas pelaksanaannya, baik dukungan maupun penolakan (Dunn, 2003:437).
- 6) Kelayakan: Mengacu pada nilai-nilai tujuan program dan kekuatan asumsi yang melandasi tujuan tersebut. Kelayakan digunakan untuk menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan merupakan pilihan tujuan yang layak (Dunn, 2003:437).

Dari penjelasan tersebut, dapat dilihat bahwa Model evaluasi kebijakan dari William N. Dunn dipilih dalam penelitian ini karena beberapa alasan penting, yaitu:

- 1) Pendekatan Komprehensif: Model Dunn menyediakan kerangka kerja yang menyeluruh untuk mengevaluasi kebijakan, mencakup berbagai aspek dari perencanaan hingga implementasi. Ini memungkinkan analisis yang mendalam dan terstruktur mengenai berbagai dimensi kebijakan.
- 2) Fokus pada Hasil dan Dampak: Dunn menekankan pentingnya menilai hasil dan dampak kebijakan, tidak hanya pada proses implementasi tetapi juga pada efektivitas dan efisiensi kebijakan. Ini sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin mengevaluasi dampak aplikasi Srikandi dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan arsip.
- 3) Kesesuaian dengan Konteks Penelitian: Model Dunn relevan untuk evaluasi kebijakan di sektor publik, termasuk aplikasi teknologi informasi seperti Srikandi di Setjen DPD RI. Model ini dapat membantu dalam menganalisis bagaimana kebijakan tersebut diterapkan dan sejauh mana kebijakan tersebut memenuhi tujuannya.
- 4) Pendekatan Partisipatif: Dunn mendorong keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam proses evaluasi, yang dapat memberikan perspektif yang lebih luas dan mendalam. Ini penting untuk

mendapatkan umpan balik yang komprehensif mengenai penerapan aplikasi dan peranannya dalam pengelolaan arsip.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan induktif. Melalui pendekatan ini, peneliti menciptakan gambaran yang kompleks, menelaah kata-kata, melaporkan detail dari pandangan informan, dan melakukan studi dalam situasi alami (Creswell, 2015). Dengan menggunakan metode ini, peneliti juga memerlukan kedekatan yang intensif antara subjek penelitian dengan peneliti (Sugiyono, 2017).

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara terstruktur, observasi dan dokumentasi. Sedangkan validasi data menggunakan teknik triangulasi. Data primer diperoleh dengan cara memilih informan yang dianggap memahami masalah penelitian (*purposive sampling*). Informan yang dipilih secara *purposive* adalah informan yang dianggap mengetahui kebenaran yang terjadi di lapangan dan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan, yaitu:

Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan interaktif Miles, Huberman & Saldana (2014), yang mencakup tiga tahap utama: (1) reduksi data dengan menyaringnya untuk mendapatkan informasi yang relevan; (2) menyajikan data dan informasi yang terkumpul; dan (3) menarik kesimpulan dari hasil analisis.

Fokus penelitian adalah panduan utama dalam pengamatan penelitian, sehingga observasi dan analisis hasil penelitian menjadi lebih terarah. Oleh karena itu, digunakan indikator-indikator agar pembahasan tidak terlalu luas dan tetap sesuai dengan judul penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Optimalisasi aplikasi Srikandi di Setjen DPD RI merupakan tujuan utama dari evaluasi penerapan kebijakan ini. Evaluasi penerapan aplikasi ini bertujuan untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan relevansi sistem dalam mendukung pengelolaan arsip dinamis dan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Menurut William Dunn (2017), evaluasi penerapan kebijakan melibatkan penilaian mendalam mengenai sejauh mana kebijakan atau program mencapai tujuan yang telah ditetapkan, serta bagaimana proses penerapannya berjalan. Dunn menekankan pentingnya penggunaan indikator kinerja yang jelas dan pemantauan berkelanjutan untuk mengukur keberhasilan implementasi (Dunn, 2017).

Berdasarkan hasil analisis data atas temuan penelitian di lapangan, lalu dielaborasi dengan teori evaluasi kebijakan Dunn (2017), dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1) Efektivitas Penggunaan Aplikasi Srikandi.

Aplikasi Srikandi dirancang untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan administrasi di Setjen DPD RI. Dari perspektif teori evaluasi kebijakan William Dunn, efektivitas dapat diukur dengan membandingkan hasil aktual dari kebijakan atau program dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dunn menekankan pentingnya mengidentifikasi indikator yang relevan untuk mengukur efektivitas dan membandingkannya dengan standar yang diharapkan.

Berdasarkan temuan, aplikasi Srikandi telah menunjukkan peningkatan signifikan dalam efisiensi administrasi, terutama dalam hal pengesahan dokumen. Perubahan ini sejalan dengan tujuan awal aplikasi, yaitu mempercepat alur proses dan meningkatkan aksesibilitas dokumen secara real-time. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian dari Noor et al. (2023) yang menyimpulkan bahwa penggunaan aplikasi Srikandi sudah cukup baik, karena telah efektif dan optimal dalam proses pengelolaan surat menyurat di dunia pemerintahan. Namun, efektivitas tersebut tidak merata di seluruh unit, dan beberapa kendala teknis seperti lag aplikasi menunjukkan bahwa penerapan tidak sepenuhnya berhasil. Ini mencerminkan teori Dunn mengenai pentingnya evaluasi berkelanjutan untuk mengidentifikasi dan mengatasi hambatan dalam penerapan kebijakan.

2) Efisiensi Penggunaan Aplikasi Srikandi.

Dalam konteks efisiensi, teori evaluasi kebijakan William Dunn menekankan pentingnya mengukur dampak kebijakan terhadap pemanfaatan sumber daya dan hasil yang dicapai. Penggunaan

aplikasi Srikandi telah menunjukkan peningkatan efisiensi yang signifikan, seperti pengurangan penggunaan kertas dan penyimpanan fisik. Penerapan sistem pengindeksan yang baik dan fitur pencarian canggih memungkinkan akses yang lebih cepat ke arsip, yang merupakan indikator positif dari peningkatan efisiensi. Namun, beberapa tantangan masih ada, seperti kesulitan dalam adaptasi pengguna baru dan kebutuhan untuk pelatihan tambahan. Dunn mencatat bahwa efisiensi tidak hanya bergantung pada teknologi itu sendiri, tetapi juga pada cara penggunaannya dan dukungan yang tersedia. Kesulitan dalam memahami fitur canggih dan perlunya dukungan tambahan menunjukkan bahwa peningkatan efisiensi memerlukan perhatian terhadap aspek pelatihan dan adaptasi pengguna. Hal-hal seperti juga ditemukan oleh penelitian (Aini, 2023) yang menyebutkan bahwa inovasi bidang kearsipan melalui aplikasi Srikandi di BMKG sudah berjalan dengan baik, namun masih terdapat beberapa hambatan seperti belum semua unit kerja menerapkan Srikandi, sering terjadi kendala jaringan yang menghambat akses, dan kurangnya dukungan dari pimpinan.

3) Kecukupan Penggunaan Aplikasi Srikandi.

Aplikasi Srikandi menunjukkan kemajuan dalam pengelolaan administrasi dan laporan, tetapi masih ada tantangan dalam hal pelatihan dan pemahaman fitur. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun aplikasi telah memberikan dampak positif, masih diperlukan penyesuaian untuk memastikan bahwa semua pengguna dapat memanfaatkan aplikasi secara maksimal. Dalam konteks ini, teori Dunn menekankan pentingnya umpan balik dari pengguna sebagai dasar untuk perbaikan berkelanjutan.

4) Perataan Manfaat Penggunaan Aplikasi Srikandi.

Aplikasi Srikandi di Setjen DPD RI dirancang untuk meningkatkan efisiensi administrasi dan manajemen sumber daya. Namun, penting untuk mengevaluasi sejauh mana manfaat aplikasi ini terdistribusi secara merata di berbagai unit kerja. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa teknologi informasi dapat menghadapi tantangan dalam hal adopsi yang berbeda-beda di antara unit-unit yang berbeda. Faktor-faktor seperti pelatihan yang tidak merata, perbedaan pemahaman fitur, dan kesiapan teknologi di masing-masing unit dapat mempengaruhi seberapa baik aplikasi tersebut memberikan manfaat. Hasil observasi menunjukkan bahwa aplikasi Srikandi memang membawa peningkatan dalam hal efisiensi dan pengurangan biaya, seperti penghematan penggunaan kertas dan biaya ekspedisi. Namun, perbedaan dalam adopsi dan pelatihan dapat menyebabkan manfaat tidak merata di antara unit-unit yang berbeda. Penelitian ini menggarisbawahi perlunya pendekatan yang lebih holistik dalam implementasi dan pelatihan untuk memastikan distribusi manfaat yang lebih adil, seperti halnya hasil penelitian (Utami et al., 2024) yang menyimpulkan bahwa dari tujuh dimensi yang dianalisis, efektivitas penerapan SRIKANDI belum sepenuhnya optimal, sehingga diperlukan langkah-langkah perbaikan dengan mempertimbangkan faktor-faktor penghambat.

5) Responsivitas Penggunaan Aplikasi Srikandi.

Responsivitas aplikasi dalam konteks administrasi yang dinamis adalah aspek kunci untuk memastikan kelancaran operasional. Dunn (2017) menjelaskan bahwa evaluasi responsivitas harus mencakup:

- a) Kemampuan Sistem Menanggapi Permintaan: Seberapa cepat dan efektif sistem merespons berbagai permintaan dan perubahan.
- b) Kinerja Sistem dalam Situasi Berbeda: Bagaimana sistem berfungsi dalam berbagai kondisi operasional, termasuk saat menghadapi lonjakan volume atau perubahan besar.

Dalam konteks Srikandi, responsivitas yang baik dicapai melalui desain aplikasi yang memungkinkan penanganan volume data yang besar dan berbagai jenis permintaan pengguna. Namun, masalah seperti penundaan saat pembaruan sistem dan situasi mendesak menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk perbaikan, terutama dalam hal kecepatan respons dan dukungan teknis.

6) Kelayakan Penggunaan Aplikasi Srikandi.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa aplikasi Srikandi memiliki potensi besar dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan arsip dan mendukung administrasi berbasis elektronik. Namun, terdapat beberapa kendala yang memerlukan perhatian, seperti kecepatan sistem, dukungan teknis, dan pelatihan pengguna. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi sistem

informasi sangat bergantung pada pemeliharaan sistem, pelatihan pengguna, dan dukungan teknis yang memadai.

Secara keseluruhan, aplikasi Srikandi menunjukkan kelayakan yang baik dalam konteks penggunaannya di Setjen DPD RI. Namun, untuk mencapai hasil optimal, perlu ada upaya berkelanjutan untuk mengatasi kelemahan yang ada dan memastikan bahwa aplikasi ini dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh semua unit kerja. Evaluasi menyeluruh dan tindakan perbaikan yang tepat sangat penting untuk mendukung reformasi birokrasi dan pengelolaan arsip yang lebih efektif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis pada bab hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Evaluasi Penerapan Aplikasi Srikandi di Setjen DPD RI.

Evaluasi penerapan aplikasi Srikandi di Setjen DPD RI menunjukkan bahwa aplikasi ini meningkatkan efisiensi administrasi dan aksesibilitas dokumen secara *real-time*. Srikandi memenuhi kebutuhan administratif, tetapi masih membutuhkan penyesuaian berdasarkan umpan balik pengguna. Responsivitas terhadap aplikasi sangat baik dalam situasi normal, namun masih menghadapi tantangan dalam penanganan masalah teknis dan permintaan mendesak. Secara keseluruhan, aplikasi Srikandi menunjukkan kelayakan yang baik, tetapi memerlukan perhatian terhadap kecepatan sistem, dukungan teknis, dan pelatihan pengguna untuk hasil yang lebih optimal.

2. Faktor-Faktor Penghambat Penggunaan Aplikasi Srikandi di Setjen DPD RI.

Hasil penelitian ini mengungkap beberapa tantangan utama yang memengaruhi efektivitas aplikasi Srikandi. Hambatan utama meliputi keterbatasan infrastruktur teknologi, kurangnya pelatihan dan sosialisasi, serta dukungan teknis yang belum memadai. Masalah integrasi sistem, keamanan dan privasi data, serta kekurangan SDM Arsiparis terlatih juga turut mempengaruhi efektivitas aplikasi. Evaluasi berkala diperlukan untuk memahami dan mengatasi hambatan ini.

3. Upaya-upaya yang Diperlukan untuk Meningkatkan Kualitas Penggunaan Aplikasi Srikandi Dalam Mendukung Tugas Konstitusional Kelembagaan DPD RI.

Untuk meningkatkan kualitas penggunaan aplikasi Srikandi di Setjen DPD RI, perlu diupayakan langkah-langkah strategis yang melibatkan peningkatan kapasitas server, perbaikan jaringan, dan penyediaan pelatihan yang lebih terstruktur. Berdasarkan teori evaluasi kebijakan William Dunn – yang menekankan pentingnya dukungan manajerial dan pelatihan dalam adopsi teknologi – langkah-langkah ini mencakup pengembangan sistem yang berkelanjutan dan perhatian terhadap keamanan serta privasi data. Evaluasi yang berkala dan berkelanjutan –berdasarkan umpan balik pengguna dan analisis kebutuhan– akan memastikan aplikasi Srikandi memberikan manfaat maksimal dan mendukung efisiensi pengelolaan arsip guna memperkuat sistem pemerintahan berbasis elektronik di Setjen DPD RI.

SARAN

Untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas penerapan aplikasi Srikandi, diperlukan serangkaian langkah strategis yang mencakup berbagai aspek, mulai dari infrastruktur hingga keamanan data. Saran-saran berikut dirancang untuk mengatasi kendala yang ada sekaligus memaksimalkan potensi aplikasi ini, yaitu:

1. Optimalisasi Infrastruktur dan Teknologi.

Perlu adanya peningkatan kapasitas server dan perbaikan jaringan untuk memastikan aplikasi Srikandi dapat berjalan dengan lancar, terutama saat menghadapi permintaan mendesak dan masalah teknis. Infrastruktur teknologi yang memadai akan mendukung responsivitas dan aksesibilitas dokumen secara *real-time*.

2. Peningkatan Pelatihan dan Sosialisasi.

Penting untuk menyediakan pelatihan yang lebih terstruktur dan berkelanjutan bagi para pengguna aplikasi. Hal ini akan meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam mengoperasikan Srikandi, serta memastikan penggunaan aplikasi yang lebih efektif dalam mendukung tugas-tugas administratif.

3. Penggunaan Aplikasi Mobile Srikandi

Dengan adanya aplikasi mobile Srikandi, pegawai dapat mengakses, mengelola, dan menandatangani dokumen secara elektronik dari perangkat seluler mereka. Ini tidak hanya menghemat waktu tetapi juga mempercepat proses kerja, mengurangi ketergantungan pada dokumen fisik, dan juga memungkinkan adanya fleksibilitas dalam bekerja, terutama dalam situasi di mana akses ke kantor fisik terbatas.

DAFTAR PUSTAKA

- Adra, A., & Permana, I. (2023). Pemanfaatan Aplikasi Srikandi Bagi Pegawai di Pusat Pengembangan SDM Regional Bukittinggi. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN)*, 11(01), 1–12. <https://doi.org/10.31629/juan.v11i01.5807>
- Aini, Y. N. (2023). Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi*, 7(1), 84–88. <https://knia.stialanbandung.ac.id/index.php/knia/article/view/900>
- Anukoonwattaka, W., Romao, P., Bhogal, P., Bentze, T., Lobo, R. S., & Vaishnav, A. (2021). Digital Economy Integration in Asia and the Pacific: Insights from DigiSR II 1.0. *Asia-Pacific Sustainable Development Journal*, 28(2), 113–148.
- Arief, A., & Abbas, M. Y. (2021). Kajian Literatur (Systematic Literature Review): Kendala Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). *PROtek : Jurnal Ilmiah Teknik Elektro*, 8(1), 1–6. <https://doi.org/10.33387/protek.v8i1.1978>
- Bahari, K. M., & Frinaldi, A. (2023). Inovasi Pengolahan Arsip Dinamis Melalui Aplikasi SRIKANDI di Kabupaten Solok. *JIMPS: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(2), 874–879. <https://doi.org/10.24815/jimps.v8i2.24833.25144>
- Choirunnisa, L., Oktaviana, T. H. C., Ridlo, A. A., & Rohmah, E. I. (2023). Peran Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Dalam Meningkatkan Aksesibilitas Pelayanan Publik di Indonesia. *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial*, 3(1), 71–95. <https://doi.org/10.15642/sosyus.v3i1.401>
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches (Fourth Edition)* (4 ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Devina, A. S., Safii, M., Prasetyawan, A., & Ghazali, A. M. (2024). Evaluasi Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi) Pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Batu. *BIBLIOTIKA: Jurnal Kajian Perpustakaan dan Informasi*, 8(1), 220. <https://doi.org/10.17977/um008v8i12024p220-237>
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Alih Bahasa oleh Samoedra Wibawa, Diah Asitadani, Agus Heruanto Adna, dan Erwan Agus Purwanto)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dunn, W. N. (2017). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach (6th Edition)*. New York: Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315181226>
- Hayat. (2020). Paradigma Good Governance Menuju Shared Governance Melalui Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik. *Aristo (Social, Politic, Humaniora)*, 8(1), 1. <https://doi.org/10.24269/ars.v8i1.2270>
- Kencono, B. D., Putri, H. H., & Handoko, T. W. (2024). Transformasi Pemerintahan Digital: Tantangan dalam Perkembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Indonesia. *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(2), 1498–1506. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i2.3519>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook [Edition 3] (Terjemahan)*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

- Millenia. (2023). Efektivitas Pelayanan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi) di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan (JIWP)*, 2023(15), 403–408. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8214031>
- Noor, A. S. S. P., Damayanti, F., & Garnida, A. (2023). Aplikasi Srikandi dalam Meningkatkan Komunikasi Tertulis di Kantor Perwakilan BKKBN Jawa Barat. *Manajemen dan Sistem Informasi*, 22(2), 216–226. <https://doi.org/10.17509/manajerial.v22i2.57947>
- Sugiyono. (2017). *Methods of Quantitative, Qualitative and Combination Writing (mixed methods)*. Bandung: Alfabeta Press.
- The United Nations. (2022). *2022 E-Government Development Index*. 2022. <https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Data-Center>
- The World Bank. (2020). *Individuals Using the Internet (% of Population)*. https://data.worldbank.org/indicator/IT.NET.USER.ZS?name_desc=false
- Utami, Y., Khairi, H., & Sartika, I. (2024). Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi di Pemerintah Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah. *Action Research Literate (ARL)*, 8(4), 649–660. <https://doi.org/10.46799/ar.v8i4.297>